

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Australia pada masa lalunya merupakan salah satu negara koloni dari Inggris (Affairs, 2013). Dalam jangka waktu yang cukup panjang, dibawah naungan Inggris secara tidak sadar Australia membentuk ketergantungan pada negara induknya. Ketergantungan tersebut antara lain berupa kebijakan pertahanan, kebijakan ekonomi hingga kebijakan luar negerinya. Namun dengan seiring berjalannya waktu, pengaruh Inggris di dunia khususnya kawasan Asia mulai memudar secara signifikan tergambar pada jatuhnya benteng pertahanan Inggris di Singapura serta pengeboman wilayah Darwin oleh Jepang (Gertz, 2003). Melihat fenomena tersebut, Australia yang terbentuk dengan adanya ketergantungan didalamnya hanya melihat satu solusi konkret, yaitu mencari induk baru sebagai sandaran sebagai wadah dukungan dalam keberlangsungan Australia sebagai negara. Berdasar pada Statute of Westminster tahun 1931, Australia secara sah dan legal tidak lagi bersandar penuh pada Inggris (Bisley, 2018). Dengan latar belakang yang bersandar pada induknya, Australia memilih apa yang sebenarnya sudah dilalui sebelumnya. Mencari, mendekati, dan menyandar pada induk yang mendominasi di dunia internasional.

Amerika Serikat menjadi pilihan Australia, hal ini dikarenakan Amerika memiliki kekuatan yang cukup besar dan juga merupakan stabilitator keamanan dunia terlebih di kawasan Asia-Pasifik. Berkaca pada pertempuran Laut Karang pada tahun 1942, dimana Australia dengan bantuan armada dari Amerika Serikat

berhasil mengalahkan dan memukul mundur Jepang dari Midway hingga dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat (Prange, 2022). Dengan peristiwa tersebut, Australia melihat peluang kerjasama serta kandidat utama dalam mendukung keamanannya.

Dimulai dengan penandatanganan pakta pertahanan ANZUS TREATY pada tahun 1951 yang melibatkan tiga negara yaitu Australia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru (Challenges & Gyngell, 2018). Selain itu, Amerika Serikat yang menjadi jawara pada Perang Dunia II juga secara otomatis menjadi negara dengan kekuatan terbesar, kesempatan itu digunakan oleh Amerika Serikat untuk menjadi penyokong di dunia internasional dengan membentuk *Bretton Woods Systems* dan *Marshall Plan* yang berfokus pada pembangunan ekonomi dunia. Pada tahun 2011, kerjasama Australia dan Amerika Serikat membuka lembaran baru, dengan diadakannya pertemuan Australia-United States Ministerial Consultations (AUSMIN) di San Fransisco, dalam pertemuan ini, kerjasama pertahanan merupakan bahasan utama antara Australia dan Amerika Serikat (AUSMIN - Australia-United States Ministerial Consultations, 2022).

Kerjasama pertahanan tidak hanya mengenai operasi militer, akan tetapi mengenai kegiatan-kegiatan pertahanan seperti pertukaran atau pergantian personel, kunjungan alat-alat militer, pertemuan pejabat senior militer dan juga kementerian pertahanan, pendidikan, program bantuan, dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan militer di kedua atau salah satu negara yang melakukan kerjasama pertahanan. Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Perdana Menteri Australia Julia Gillard Pada 16 November 2011

mengumumkan mengenai kesepakatan kerjasama Force Posture, dengan menempatkan pangkalan militer Amerika Serikat di Darwin, Australia (Prime Minister Gillard and President Obama Announce Force Posture Initiatives | Whitehouse.Gov, n.d.).

Selain pertahanan, ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi suatu negara. Tiongkok yang merupakan negara dengan kemajuan ekonomi pesat tentunya diinginkan oleh banyak negara, namun ketakutan juga timbul akibat dominasi yang diperlihatkan. Australia menjadikan Tiongkok sebagai rekan dalam melakukan kerja sama bilateral pada bidang ekonomi, dan juga memang karena keduanya telah melakukan kerja sama yang cukup lama. Tiongkok juga menjadi negara yang melakukan perdagangan tertinggi dengan Australia dibandingkan negara lainnya, bahkan Amerika Serikat (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2022). Salah satu kerjasama besar mereka ialah China-Australia Free Trade Agreement (ChAFTA) yang mulai berlaku pada 20 Desember 2015 (China-Australia Free Trade Agreement (ChAFTA) - Austrade, n.d.).

Tiongkok, salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di ASIA, diikuti oleh sistem pertahanan, mulai memperlihatkan posisinya di kawasan itu. Sebagai negara berkekuatan besar di dunia, Amerika Serikat memperhatikan apa yang dilakukan Tiongkok. Selama pemerintahan Obama, Amerika Serikat memandang agresi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan sebagai ancaman nyata. Oleh karena itu, Amerika Serikat kemudian menanggapi ancaman tersebut dengan menyeimbangkan kekuatannya dengan kekuatan Tiongkok melalui langkah-langkah militer, yaitu menambah jumlah personel militer Amerika di kawasan

tersebut. Persaingan antara militer Tiongkok dan Amerika telah menyebabkan persaingan strategis antara keduanya di lingkaran Asia-Pasifik. Dampak dari persaingan tersebut, Australia harus menghadapi dilema akibat persaingan antara AS dan Tiongkok. Dibuktikan pada bulan Mei 2020, saat Amerika Serikat dan WHO menuding Tiongkok atas penyebaran virus Covid-19 dan meminta untuk dilakukannya penyelidikan ke Tiongkok, Australia pada saat itu ikut serta mendukung tindakan tersebut. Tidak lama dari tuduhan tersebut, Tiongkok memberlakukan tarif bea sebesar 80% untuk produk pangan Australia selama 5 tahun.

Persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat ini tidak diragukan lagi telah membuat negara-negara lain di kawasan itu khawatir. Hal ini dikarenakan status negara-negara tersebut hampir semuanya tergolong *middle power*. Beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia memiliki aliansi militer yang kuat dengan Amerika Serikat namun juga memiliki hubungan perdagangan yang erat dengan Tiongkok, didukung oleh bangkitnya perekonomian Tiongkok telah berhasil merebut posisi ekonomi Amerika Serikat. Hal ini menciptakan kondisi politik yang sulit bagi negara-negara tersebut, terutama Australia. Namun dibalik semua dilema dan praduga, Australia selalu menemukan jalan untuk mempertahankan kerjasamanya dengan kedua negara tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan sebuah permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yakni bagaimana Australia melalui *hedging strategy*

tetap mampu mempertahankan hubungan dan kerjasama yang baik dengan Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2019 hingga 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai upaya serta strategi kebijakan luar negeri Australia dengan menggunakan *hedging strategy* yang sampai sekarang masih digunakan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan akademis dan kegunaan praktis bagi para pembaca sebagai mana yang diuraikan pada subbab berikutnya.

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memperluas wawasan penstudi Hubungan Internasional terkait teknik dan kapabilitas dari *hedging strategy*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya terkait *hedging strategy*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara Praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan serta pertimbangan bagi para pembuat kebijakan yang mengalami kondisi serupa dengan Australia sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dilema hubungan antar negara pada masa yang akan datang.

1.5 Kerangka Pemikiran Konseptual

Dalam melihat fenomena hubungan antar negara di dunia, para pengamat politik ataupun penstudi Hubungan Internasional dapat menggunakan beberapa teori ataupun konsep yang dimiliki oleh Ilmu Hubungan Internasional seperti realisme, konstruktivis, liberal dan sebagainya. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, proses relasi antar negara serta *output* yang dihasilkan terus berubah-ubah dan tidak selalu berakhir dengan dasar pemikiran Ilmu Hubungan Internasional. *Hedging strategy* hadir sebagai konsep baru bagi para pengamat dan penstudi Hubungan Internasional dalam menganalisis pergerakan politik internasional.

Salah satu penelitian terkait *hedging strategy* adalah penelitian berjudul *Engagement and Hedging: Japan's Strategy toward China* yang ditulis oleh Yasuhiro Matsuda (2012). Dalam penelitiannya tersebut, Matsuda membahas mengenai bagaimana Jepang menghadapi '*rising china*' yang menjadi perhatian banyak negara karena dianggap sebagai ancaman. Jepang dan Tiongkok memiliki hubungan historis yang cukup lama, dimana kedua negara tersebut pada masa lampunya merupakan tetangga 'kerajaan'. Dengan intensitas kerjasama yang cukup baik, Jepang dikejutkan dengan klaim sepihak kepulauan Senkaku oleh Tiongkok. Berkaca pada fenomena tersebut, Jepang dalam strategi pertahanannya membentuk kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat namun tetap mempertahankan strategi keterlibatannya dengan Tiongkok.

Dalam strategi kontroversialnya, Jepang memutuskan untuk mengubah pandangan bahwa Tiongkok bukanlah sebuah ancaman, dengan harapan, latar belakang kerjasama historis yang akan terus berlanjut. Namun, James Mann dalam

bukunya *The China Fantasy* mengatakan bahwa merupakan sebuah angan-angan untuk menganggap Tiongkok akan berlaku demokrasi setelah mencapai tingkat kemakmuran tertentu (Mann, 2007). Jepang dengan *hedging strategy*-nya mempertahankan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat, membentuk hubungan baik dengan negara tetangga dengan keterlibatan dan membangun hubungan yang lebih intens dengan Tiongkok.

Penelitian lainnya terkait *hedging strategy* adalah penelitian yang berjudul “*Southeast Asian strategies toward the great powers: still hedging after all these years?*” yang ditulis oleh Evelyn Goh (2016). Penelitian ini membahas dan mengulik mengenai pola penggunaan *hedging strategy* yang masih digunakan oleh negara-negara di Asia Tenggara terhadap negara-negara besar di dunia.

Perbedaan penelitian yang ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus kepada Australia yang memiliki hubungan cukup dekat dengan Amerika Serikat dan Tiongkok, dimana negara-negara lain khususnya di kawasan Asia seperti Jepang dan Vietnam yang mengimplementasikan *hedging strategy* tidak memiliki latar belakang serta hubungan yang cukup intens dengan kedua negara tersebut secara bersamaan. Selain itu, dengan latar belakang Australia yang merupakan negara persemakmuran Inggris juga menjadi pembeda. Dengan perbedaan tersebut, Australia seharusnya memiliki beban yang berbeda dan lebih besar dalam menentukan arah dari kebijakan luar negerinya dibandingkan dengan negara lainnya. Demi menjaga hubungan baiknya dengan Amerika Serikat dan Tiongkok yang sudah dibangun sejak lama serta dengan susah payah demi kepentingan negaranya.

1.6 Definisi Konseptual

1.6.1 Hedging Strategy

Dalam perkembangan literatur serta akademis di dunia, *hedging strategy* terkandung dalam beberapa persepsi ilmu. Dapat ditelusuri pada akhir abad 17, dikatakan bahwa *hedging* merupakan sebuah tindakan pengamanan dari kerugian dengan bertaruh di sisi lain (Jones & Jenne, 2021). Kemudian, diadopsi oleh literatur keuangan yang mendefinisikan menunjukkan asuransi kerugian terhadap risiko dengan mengadakan kontrak yang seimbang satu sama lain (Murray Little et al. 1973). Berangkat dari definisi yang dibentuk oleh beberapa studi, *hedging strategy* diadopsi dalam studi Hubungan Internasional. Secara sederhana, *hedging strategy* dapat di deskripsikan sebagai kebijakan asuransi, yang jika berhasil, meminimalkan risiko sekaligus memaksimalkan manfaat (Medeiros, 2005; Tunsjo, 2013).

Pada dasarnya *hedging strategy* merupakan sebuah model dasar dari formula ekonomi. *Hedging strategy* adalah strategi pengelolaan risiko keuangan dengan berinvestasi pada aset yang berbeda yang cenderung berkinerja berbeda dibawah kondisi pasar yang berbeda, dengan kata lain, mengambil posisi yang saling mengimbangi atau berlawanan dalam keamanan (Scott, 2021). Dengan gambaran tersebut, penstudi Hubungan Internasional mencoba mengadopsi nilai-nilai dari *hedging strategy*.

Evelyn Goh dalam Pacific Forum CSIS 2016 menyebutkan bahwa *hedging strategy* merupakan kumpulan strategi yang ditujukan untuk menghindari (atau merencanakan kemungkinan dalam) situasi dimana negara tidak dapat menerapkan

kebijakan seperti *balancing*, *bandwagoning* ataupun netralitas (Goh, 2016). Dengan definisi tersebut, Goh, menganggap *hedging strategy* sebagai respons rasional terhadap masa depan yang menawarkan ‘transisi potensial menuju sistem regional multipolar yang tidak stabil dengan sejumlah kekuatan besar yang saling bersaing (Goh, 2007).

Secara garis besar, *hedging strategy* memiliki sedikit kesamaan dengan beberapa turunan dari realis seperti *balance of threat*, *balance of power* serta *balancing* dan *bandwagoning*. Dimana keempat konsep dari realisme tersebut secara garis besar membahas mengenai melawan sumber ancaman dan berdamai dengan sumber ancaman secara langsung tanpa melakukannya secara bersamaan. Berbeda dengan *hedging strategy* yang memungkinkan negara menghadapi ketidakpastian dalam perilaku masa depan mitra mereka dengan mengandalkan sekumpulan kebijakan yang selain membantu mempromosikan kerja sama bilateral, juga memerlukan elemen kompetitif yang bertujuan untuk mempersiapkan diri mereka terhadap potensi ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh mitranya (Hiep, 2013). Menurut Hiep, *hedging strategy* melibatkan pendekatan yang kompleks, pragmatis, dan adaptif yang digunakan suatu negara dalam mengelola hubungannya dengan kekuatan besar.

Melihat dinamika politik internasional, secara tidak sadar, beberapa negara telah melakukan *hedging strategy*. Salah satu penelitian terkait *hedging strategy* adalah penelitian berjudul *Vietnam's Hedging Strategy against China since Normalization* yang ditulis oleh Le Hong Hiep (2013). Dalam penelitiannya tersebut, Le Hong membahas mengenai pendekatan Vietnam terhadap Tiongkok

yang dapat dicirikan sebagai campuran antara rasa hormat dan pembangkangan. Selain kesamaan ideologis serta ketergantungan ekonomi yang memperkuat hubungan bilateral, Vietnam juga sadar akan ancaman keamanan dari ‘*rising china*’. Berkaca pada ketegasan Tiongkok dalam konflik laut Tiongkok selatan yang menyeret sejumlah negara sekitarnya. Lee Hong Hiep dalam bukunya menyebutkan 4 (empat) komponen major dari *hedging strategy* yaitu:

1. *Economic pragmatism*
2. *Direct engagement*
3. *Hard Balancing*
4. *Soft Balancing*

Vietnam dengan dilemanya, terlepas dari kesamaan ideologi dan hubungan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok, tetap memikirkan keamanannya. Posisi Tiongkok kembali dipertegas ketika mereka menandatangani perjanjian dengan Crestone Energy Corporation untuk melakukan eksplorasi di cekungan Tu Chinh yang terletak di landas kontinen Vietnam. Vietnam telah mengimplementasikan *economic pragmatism* dengan melakukan berbagai cara untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok, *direct engagement* dengan melakukan kerjasama secara langsung yang berbentuk kerjasama bilateral, *hard balancing* dengan melakukan program modernisasi militer, dan *soft balancing* dengan mengikuti kerjasama multilateral dalam kawasannya. Dari keempat komponen tersebut, Vietnam menjaga hubungan yang stabil dengan Tiongkok sekaligus memberi ruang untuk melawan dan menghalangi agresi Tiongkok.

1.6.2 Kepentingan Nasional

Dalam dinamika dunia internasional, negara merupakan aktor krusial. Dalam bergeraknya negara, salah satu dasarnya ialah kepentingan mereka masing-masing, dimana pemenuhan akan kepentingan nasional merupakan hal yang sangat penting. Kepentingan nasional dalam definisinya ialah sebuah kebutuhan ataupun cita dari suatu negara berdaulat yang berkaitan dengan negara berdaulat lainnya dalam ruang lingkup lingkungan eksternal (Nuechterlein, 1976). Dalam penentuan kepentingan tersebut, diperlukan beberapa indikator. Nuechterlein dalam bukunya *National interests and foreign policy: A conceptual framework for analysis and decision-making* menyebutkan tiga indikator dalam mengklasifikasi kepentingan suatu negara seperti pandangan suatu negara akan kebutuhannya, berdasar kepentingan umum, dan negara berdaulat dengan kemerdekaan penuh. Dengan indikator-indikator tersebut, para pembentuk kebijakan disediakan proses filterisasi dalam mengklasifikasi kepentingan suatu negara.

Nuechterlein dalam bukunya kembali mengklasifikasi dasar-dasar dari hasil indikator sebelumnya. Berdasarkan dinamika internasional, dia menyebutkan 4 (empat) kepentingan nasional dasar:

1. Dalam dunia yang terdiri dari banyak negara dengan egonya masing-masing, tentu memiliki risikonya sendiri. Semua negara memiliki kebutuhannya masing-masing yang tidak bisa disama-ratakan, dengan begitu kepentingan yang ada juga berbeda-beda. Hans J Morgenthau mengatakan bahwa kepentingan nasional merupakan salah satu tonggak penting dalam mendukung kebijakan luar negeri

suatu negara. Salah satu kepentingan nasional dari suatu negara ialah keamanan. Hadirnya keamanan akan membentuk rasa aman dalam internal suatu negara, dimana selaras dengan itu, mempertunjukkan kapabilitas suatu negara di dunia internasional (Simon et al., 2015). Kepentingan keamanan ini merupakan salah satu dari empat indikator kepentingan nasional (Nuechterlein, 1976). Dengan definisi melindungi negara dan warganya dari ancaman kekerasan fisik secara internal ataupun eksternal. Secara tradisional, kepentingan keamanan kerap diartikan dengan militer dan sebagainya yang dibentuk dengan tujuan mempersiapkan diri akan musuh ataupun sekedar memberi rasa aman (Kristol, 1990).

2. Pada dasarnya, ekonomi merupakan tonggak dari keberjalanannya suatu masyarakat, hal tersebut juga berlaku bagi negara. Kestabilan ekonomi merupakan salah satu cita dari setiap negara di dunia internasional. Tidak kalah pentingnya dengan keamanan, kepentingan ekonomi juga menjadi salah satu indikator dari kepentingan nasional (Nuechterlein, 1976). Nuechterlein mendefinisikan kepentingan ekonomi yang memiliki dasar tujuan meningkatkan perekonomian suatu negara melalui kebijakan luar negeri dan kerja sama dengan negara lainnya.
3. Dalam dinamika internasional, terdapat suatu sistem dan juga struktur yang tertulis maupun tidak tertulis, dalam hal ini, negara sebagai aktor utama perlu memerhatikan tatanan ini demi

kepentingannya sendiri. Kepentingan tata dunia sendiri secara definisi merupakan pemeliharaan sistem politik dan ekonomi internasional dengan tujuan memberi rasa aman kepada negara-bangsa dengan harapan memberikan wadah yang sejahtera bagi komunitas internasional.

4. Setiap negara di dunia internasional memiliki dasar yang mengatur haluan perjalanannya, salah satu dasar tersebut ialah ideologi. Kepentingan ideologis sendiri didefinisikan sebagai suatu nilai yang dipercayai oleh warga negara dalam satu negara yang memiliki kebaikan didalamnya dan berlaku secara universal di dunia internasional, dan dalam prosesnya dilindungi dan dikembangkan.

1.7 Definisi Operasional

1.7.1 Hedging Strategy

Hedging strategy didefinisikan sebagai kumpulan strategi yang dibentuk dengan dasar untuk menghindari (atau merencanakan kemungkinan di) situasi ketika suatu negara tidak dapat memutuskan alternatif (realis) seperti *balancing*, *bandwagoning*, atau netralitas (Goh, 2016).

Lee Hong Hiep mengklasifikasikan 4 (empat) indikator penting dalam *hedging strategy*. Pertama, *economic pragmatism* ataupun pragmatism ekonomi yang menjunjung tinggi hasil akhir dari suatu proses ekonomi, dimana tindakan ataupun proses yang dilakukan tidak kaku terhadap sistem yang teknis, dengan kata lain adaptif terhadap setiap perubahan. Kedua, *direct engagement* ataupun keterlibatan langsung. Dalam konteks hubungan Australia sebagai negara, Australia

melakukan keterlibatan langsung dalam bentuk kerjasama bilateral dengan negara-negara didunia khususnya Amerika Serikat dan Tiongkok. Ketiga, *hard balancing*, suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk menyamakan tingkat ancaman yang mereka terima dengan kemampuan mereka, dalam hal ini kerap kali dikaitkan terhadap kekuatan militer. Keempat, *soft balancing*, sesuai definisinya yang berarti ‘lembut’, upaya yang dilakukan untuk mengamankan diri dari ancaman melalui kerjasama-kerjasama multilateral, dengan tujuan memperbanyak aliansi dan tidak terlalu menonjolkan perlawanan.

Melalui klasifikasi indikator tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Australia selaras dengan definisi dari *hedging strategy* sebelumnya yang kemudian dapat dilihat dalam upaya Australia dalam membangun kerjasama secara bersamaan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai negara maju.

1.7.2 Kepentingan dalam Pertahanan Keamanan

Dengan definisi kepentingan dalam pertahanan keamanan yang dikemukakan oleh Nuechterlein (1976) yang telah disesuaikan dengan kepentingan dalam penelitian ini. Kepentingan dalam pertahanan keamanan merupakan salah satu konsep dari kepentingan nasional yang menyorot keamanan ataupun perlindungan terhadap unsur-unsur negara dari negara lain. Kepentingan ini selaras dengan kegiatan kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh Australia dengan Amerika Serikat.

1.7.3 Kepentingan Ekonomi

Definisi kepentingan ekonomi yang dikemukakan oleh Nuechterlein (1976) merupakan definisi yang akan disesuaikan dengan kepentingan dalam penelitian ini. Ekonomi merupakan pilar penting bagi suatu negara sebagaimana kepentingan ekonomi menjadi bagian dari konsep kepentingan negara. Kepentingan ekonomi merupakan upaya suatu negara dalam meningkatkan perekonomiannya dengan membantu kerjasama dengan negara lain (Nuechterlein, 1976). Dengan urgensi kepentingan ekonomi suatu negara, Australia melakukan kerjasama ekonomi dengan negara-negara di dunia khususnya Tiongkok.

1.8 Argumen Penelitian

Penulis berargumen penelitian yang akan ditunjukkan oleh penulis pada penelitian ini ialah melalui *hedging strategy*, Australia akan terus mempertahankan relasinya dengan dua negara maju yang penuh akan isu konfliktual. Terlepas dari rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, Australia akan tetap mempertahankan kepentingan nasionalnya dengan tetap menjalin kerjasama melalui *hedging strategy* dengan Amerika Serikat dan Tiongkok terkait pertahanan dan keamanan serta perekonomian pada tahun 2019 sampai 2022.

1.9 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kaedah penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif itu sendiri adalah untuk mendapatkan data yang bermakna. Makna yang dimaksud ialah data yang sebenarnya yang merupakan suatu nilai dibalik data yang ada (Sugiyono, 2013). Metode penelitian kualitatif sendiri dapat dikatakan sebagai Teknik Fenomologis, yakni sebuah teknik dimana mengamati

serta menganalisa dan menyimpulkan sesuatu berdasarkan fenomena yang ada (Moriarty, 2014). Metode ini memang sering digunakan dalam ilmu sosial karena dalam penggunaannya, peneliti dapat menggunakan interpretasi masing-masing dalam menganalisa fenomena-fenomena yang ada (Qualitative, 1994).

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatif dengan menjelaskan sesuatu yang terjadi dibalik sebuah fenomena. Penelitian eksplanatif akan berusaha menjelaskan suatu fenomena yang dihadapi oleh subjek penelitian berdasarkan data-data dan informasi yang ada (Moleong, 2007). Dengan menggunakan penelitian bersifat explanative, penelitian ini akan berusaha menjawab bagaimana *hedging strategy* mampu digunakan dalam mempertahankan hubungan Australia dengan Amerika Serikat dan Tiongkok.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini nantinya akan dilakukan dengan cara desk research. Penggunaan metode ini, berarti peneliti akan melakukan penelitian dari tempat tinggal sementara yakni Kota Semarang. Peneliti nantinya akan mengumpulkan data yang lengkap dan akurat serta sesuai melalui jurnal-jurnal yang beredar di internet dengan melakukan penyeleksian data terkait relevansi dan ke absahannya.

1.9.3 Subjek Penelitian

Beberapa subjek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Australia sebagai negara *middle power* yang memiliki kecenderungan atas sifat

ketergantungannya terhadap Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai penyokong dalam keberlanjutan dalam keamanan dan perekonomian.

1.9.4 Jenis Data

Jenis data yang nantinya akan dikumpulkan ialah primer dan sekunder yang dapat berupa kata-kata, artikel, buku, grafik, tabel dan gambar hingga dokumen resmi yang mendukung dan menggambarkan fenomena yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut dapat dijadikan sumber penguatan dalam analisa dan argumen peneliti untuk membuat kesimpulan.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data yang nantinya akan dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer berarti peneliti akan memperoleh data dari situs-situs resmi pemerintah yang berbentuk rekaman tertulis maupun lisan. Sumber sekunder berarti bahwa peneliti memperoleh data yang telah dikumpulkan oleh sumber lain, hal ini termasuk dalam jurnal-jurnal atau berita-berita yang terdapat dalam internet (Ajayi, 2017). Nantinya data ini akan digunakan peneliti untuk mempermudah melakukan analisa dan kesimpulan.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, nantinya peneliti akan melakukan metode kongruen, dimana nantinya peneliti akan meneliti hubungan antara penelitian dan pertanyaan. Metode kongruen ini juga biasanya disebut dengan metode sebangun (Rosyidin, 2020). Penggunaan metode kongruen ini biasanya akan berfokus pada sebab-akibat terhadap suatu fenomena yang ada. Oleh karena itu, nantinya peneliti akan mencari

variabel-variabel yang mendukung dalam hasil analisa dan kesimpulan sebagai landasan bukti dan penguatan. Metode analisis data kongruen dalam penelitian ini digunakan untuk melihat adanya hubungan kausalitas dalam implementasi *hedging strategy* dengan hubungan kerjasama Australia dengan Amerika Serikat dan Tiongkok.